

**PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA  
TENGAH DALAM PENGEMBANGAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)  
DI SEMARANG**

**MADE FEBRIANTHA PARISTIAWAN  
(ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNDIP)**

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya atau banyaknya jumlah Anak Berkebutuhan Khusus maka meningkat pula jumlah SLB yang sudah berdiri di hampir setiap Kabupaten/ Kota. Dari pernyataan diatas maka tidak menjadikan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah selesai, karena masalah pendidikan di SLB tidak hanya berkaitan dengan kuantitas namun juga kualitasnya. Hal ini berarti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah seharusnya juga memiliki peran dalam meningkatkan mutu pendidikan di SLB Negeri maupun SLB Swasta sebagaimana upaya peningkatan kualitas di sekolah umum agar siswa lulusan SLB juga dapat memiliki kualitas yang baik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pengembangan SLB di Semarang.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya terjadi dan membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara terbuka. Dalam penelitian ini data yang sudah terkumpul akan dianalisis kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan SLB di Semarang adalah sebagai pemangku kebijakan, melakukan pengkoordinasian, pembinaan sekaligus mengawasi serta menyusun program pembelajaran berdasarkan kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum K-13, program yang disusun disesuaikan standar kompetensi sesuai dengan peraturan pemerintah untuk sekolah berkebutuhan khusus. Program yang direncanakan dan yang akan disampaikan harus mengandung 5 aspek yang harus disampaikan. Kelima aspek tersebut yaitu, 1) Permainan, 2) Aktivitas ritmik, 3) Aktivitas pengembangan uji diri keagamaan, 4) Aktivitas kebugaran jasmani, serta 5) kesehatan, kelima aspek tersebut dikembangkan menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Sekolah Luar Biasa (SLB), Kurikulum 2013

**THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE  
OF CENTRAL JAVA PROVINCE IN THE DEVELOPMENT OF SPECIAL  
SCHOOLS (SLB) IN SEMARANG**

**MADE FEBRIANTHA PARISTIAWAN  
(SCIENCE OF GOVERNMENT FISIP UNDIP)**

**ABSTRACTION**

This study is motivated by the increasing or the number of Children with Special Needs, so also the number of SLB that has been established in almost every regency / city. From the above statement it does not make the role of the Department of Education and Culture of Central Java province is completed, because the problem of education in SLB is not only related to the quantity but also the quality. This means that the Office of Education and Culture of Central Java Province should also have a role in improving the quality of education in SLB Negeri and private SLB as an effort to improve quality in public schools so that SLB graduate students can also have good quality. This research has purpose to know the role of Department of Education and Culture of Central Java Province in the way to develop SLB in Semarang.

The type of research used in this study is qualitative research method using an analytical descriptive approach that describes the actual situation occurs and create a systematic, factual and accurate description of the facts, properties and relationships between the phenomena investigated. Methods of data collection in research using observation method, documentation and open interview. In this study the data that have been collected will be analyzed and then drawing conclusions.

The results of this study found that the Role of Education and Culture Office of Central Java Province in the development of SLB in Semarang is as a policymaker, coordinating, coaching and supervising as well as compiling learning programs based on the curriculum used is K-13 curriculum, In accordance with government regulations for special needs schools. Programs planned and to be delivered must contain 5 aspects to be conveyed. The five aspects are: 1) Games, 2) rhythmic activities, 3) development activities of religious self-test, 4) physical fitness activity, and 5) health, the five aspects are developed into standard competence and basic competence.

Keywords : The Role of Government, Special School (SLB), Curriculum 2013

## **A. LATAR BELAKANG**

Kebutuhan akan pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara yang ada di dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Pendidikan mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Banyak kajian menyatakan tentang besarnya suatu bangsa dikarenakan pendidikan. Terdapat kuatnya hubungan antara pendidikan sebagai sarana pengembang sumber daya manusia dengan kualitas dan kemajuan suatu bangsa yang adil dan makmur. Pendidikan yang mengembangkan dan memfasilitasi perubahan yaitu pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dalam siklus kehidupan manusia mulai lahir hingga akhir hayat (*long life education*). Secara konsep, pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan adalah suatu proses transfer of knowledge (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) yang dilakukan oleh guru kepada anak didiknya. Selain itu peran pendidikan sangat besar dalam memajukan suatu bangsa untuk mendapatkan sumber daya manusia yang cerdas dan mandiri. Tujuan pendidikan yang mulia tersebut hendaknya dijadikan cita-cita pendidikan yang ideal.

Pendidikan di Indonesia merupakan suatu pengaruh untuk bangsa Indonesia menjadikan Indonesia menjadi lebih maju dan berkembang. Sebagai Negara yang masih berkembang, pendidikan di Indonesia masih sangat kurang dan masih jauh tertinggal di bandingkan Negara-Negara di Asia maupun Negara berkembang lainnya. Indonesia telah mengalami penurunan peringkat dalam bidang pendidikan dari 58 ke 62 dalam 130 Negara lainnya. Dengan ini kita bisa melihat bahwa pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan.

Mutu pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami masalah yang demikian rumit. UNESCO meletakkan Indonesia dengan Human Development Index (HDI) pada urutan ke-112 diantara 174 negara yang diteliti, sedangkan The Political and Economics Risk Consultancy (PERC) yang berpusat di Hongkong telah meletakkan sistem pendidikan di Indonesia pada urutan ke-12 diantara 12 negara yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan di Indonesia sedang berada dalam kondisi yang tidak nyaman.<sup>1</sup>

Keterlibatan negara dalam pendidikan ditentukan dengan adanya berbagai regulasi mengenai pendidikan. Di Indonesia misalnya dalam terdapat UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, UUGD No 14 Tahun 2005 dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga UU tersebut mengatur penyelenggaraan pendidikan, baik yang dilakukan pemerintah (pusat dan daerah) maupun yang dilakukan masyarakat. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 bab IV pasal 5-11 dijelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, dan pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkelainan. Pada penjelasan pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Tujuan dari pendidikan luar biasa adalah suatu pendidikan yang diberikan kepada warga negara yang memiliki kelainan fisik atau mental agar nantinya bisa kembali bersosialisasi ke masyarakat.

Penyandang disabilitas bagaimanapun adalah menjadi bagian dari kebijakan nasional. Berdasarkan data Susenas tahun 2012 diperoleh bahwa jumlah penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas adalah sebesar 2,45%.<sup>2</sup> Keberadaan disabilitas terbanyak adalah pada jenis lebih dari satu jenis disabilitas

---

<sup>1</sup> Suparlan. 2011. *Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajaran, (Curriculum and Learning Material Development)*. Jakarta: Bumi Aksara.

<sup>2</sup> Kementerian Kesehatan RI, 2014

yaitu sebesar 39,97% dan jenis tunanetra sebesar 29,63%. Secara khusus data mengenai pengandang disabilitas dengan usia lebih dari 15 tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini akan merumuskan permasalahan yang akan di bahas terkait bagaimana Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Semarang? Serta Apa saja faktor penghambat dan pendukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Semarang?. Tujuannya adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Semarang. Serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Semarang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pemerintah Daerah terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah dimaknai penulis sebagai suatu bentuk penyelenggaraan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam suatu wilayah dengan lingkup yang lebih kecil (daerah), dimana unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah diantaranya adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah. Sementara itu Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pemberdayaan, pengembangan selain mereka pemilik kebijakan, mereka pula mengontrol setiap perkembangan di daerahnya. Selain itu juga bertugas sebagai pelayan dari masyarakat dan juga sebagai fasilitator/penyedia sarana dan prasarana publik.

Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai lembaga pendidikan yang dipersiapkan untuk menangani dan memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi penyandang jenis kelainan tertentu, tentunya hal ini harus mendapat perhatian tersendiri dari pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dinas memiliki peran dalam

pengembangan SLB. SLB merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental, perilaku dan sosial agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilannya. Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang dan SLB Pelita Ilmu (swasta) merupakan satu-satunya SLB negeri di Kota Semarang dan SLB swasta yang berkembang sehingga tentu menjadi pusat sumber belajar/kegiatan belajar ABK dan tentunya menjadi pusat sumber persekolahan di wilayah Semarang sehingga kedudukannya tentu cukup menjadi pilihan oleh masyarakat umum dan cukup dipercaya sebagai tempat untuk mendidik ABK karena sudah sangat berkembang dibandingkan dengan SLB lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya terjadi. Tipe penelitian kualitatif merupakan tipe penelitian dengan menggunakan metode induksi yang akhirnya akan menemukan sebuah teori atas fakta-fakta yang didapat dari data-data yang ada. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami atau ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.<sup>3</sup> Sehingga ada triangulasi dari sumber/informan dan triangulasi dari teknik pengumpulan data.

Data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara maupun observasi langsung kepada objek yang akan diteliti. Narasumber pertama dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah serta beberapa staff, Kepala Sekolah SLBN Semarang, Kepala Sekolah SLB bcd Yayasan Pelita Ilmu, serta pihak yang terlibat dalam Pengembangan SLB di Semarang.

---

<sup>3</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA Hal: 170-171

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

SLB Negeri Semarang merupakan SLB sentra di Jawa Tengah untuk mendidik anak tunanetra, tunarunguwicara, tunagrahita, tunadaksa dan autis mulai dari PAUD sampai SMALB. SLB Negeri Semarang juga sebagai *Lab School* Balai Pengembangan Pendidikan Khusus Jawa Tengah dan menjadi pusat pelatihan para alumni SMALB dan para siswa *drop out* SDLB, SMPLB, maupun SMALB untuk dididik dalam bidang keterampilan. Hal ini merupakan nilai positif dimana peran SLB Negeri Semarang sangat penting pranannya dalam meningkatkan kemampuan peserta didiknya.

Pencapaian prestasi tersebut tidak lepas dari peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta tenaga ajarnya. SLB Negeri Semarang memiliki 80 orang tenaga pengajar dimana 93,75% dari jumlah tersebut memiliki latar belakang pendidikan di bidangnya dan sisanya merupakan sarjana lulusan pendidikan sekolah luar biasa serta ditambah beberapa psikolog. Secara keseluruhan sudah cukup baik karena mereka belajar dari pengalaman ditambah sudah bisa mengenal karakteristik siswanya. Hal inilah yang merupakan salah satu poin terpenting dalam menentukan rancangan program yang akan diterapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang diterapkan SLB Negeri Semarang dan SLB Yayasan Pelita Ilmu mengacu pada Kurikulum K-13. Hal ini dikarenakan standar kompetensi sesuai dengan peraturan pemerintah untuk sekolah berkebutuhan khusus, kompetensi dasar yang ada mempunyai tingkatan yang dirasa sesuai untuk diterapkan kepada peserta didik karena didalam kenyataannya anak kebutuhan khusus mempunyai kemampuan yang berbeda antar individu dan tidak bisa disamakan, disamping itu anak berkebutuhan khusus harus ditangani melalui pendidikan individu. Pemerintah juga menetapkan Undang-Undang khusus untuk Pendidikan Khusus yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus. Dari permasalahan tersebut sekolah mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan program pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Hal tersebut juga didasari karena ingin mewujudkan kualitas kemampuan individu yang lebih baik melalui proses pendidikan.

Peran sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu dukungan yang terdapat di SLB Negeri dan Swasta di Semarang. Dalam pelaksanaannya, program pembelajarannya juga merupakan hasil pengembangan yang mengacu pada pembelajaran individu. Namun program pembelajaran yang disusun hanya berdasarkan ketunaan A, B, C, dan E sesuai dengan tingkat intelegualitas. Disamping itu, mempertimbangkan efisiensi dalam penyusunan program, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan klasifikasi ketunaan dan tingkat jenjang pendidikan. Program yang direncanakan dan yang akan disampaikan harus mengandung 5 aspek yang harus disampaikan. Kelima aspek tersebut yaitu, 1) Permainan, 2) Aktivitas ritmik, 3) Aktivitas pengembangan uji diri keagamaan, 4) Aktivitas kebugaran jasmani, serta 5) kesehatan. Kelima aspek tersebut berlaku bagi semua ketunaan serta tiap jenjang pendidikan dimana dalam pelaksanaannya disesuaikan berdasarkan kemampuan individu siswa. Peran dari kelima aspek tersebut yaitu menjadi acuan dalam setiap perumusan standar kompetensi maupun pengembangan materi yang dapat digunakan menjadi kompetensi dasar.

Pelaksanaan pembelajaran di SLB Negeri Semarang berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan tenaga pendidik yang sudah sesuai di bidangnya, selain itu manajemen alokasi waktu yang dipergunakan dimanfaatkan sebaik mungkin serta pemberian materi yang sesuai dengan kemampuan individu peserta didik. Begitupun juga dengan pelaksanaan di SLB Yayasan Pelita Ilmu Semarang. Pelaksanaan Pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan, pemilik yayasan sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan murid-muridnya yang berkebutuhan khusus untuk mengembangkan dirinya sesuai potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak. Pemilik dan



Kepala Sekolah Yayasan Pelita Ilmu juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menunjang perkembangan di Yayasan nya tersebut.

Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses kegiatan pembelajaran, antar lain apabila proses kegiatan belajar mengajar tidak sesuai seperti yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan karena minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran tiap kali selalu berubah-ubah. Dalam artian anak berkebutuhan khusus memiliki jiwa yang labil, dalam hal ini antusiasme mereka dalam mengikuti pembelajaran selalu berbeda-beda antara individu satu dengan yang lainnya. Untuk mengatasi hal ini maka pembelajaran dilakukan secara improfisasi dan hasilnya dicatat dalam jurnal harian.

Kendala dalam pembelajaran bagi siswa berkubutuhan khusus juga terdapat pada sarana dan prasarana. SLB Negeri dan swasta di Semarang memiliki faktor keluarga, teman dan lingkungan, faktor tersebut sangat mempengaruhi mood dari para siswa SLB Negeri ataupun swasta di Semarang. Faktor lainnya adalah kurangnya partisipasi dari dinas dalam mengembagkan cara pendidikan yang lebih modern dan efektif dalam mengembangkan pendidikan luar biasa melalui saran dan prasarana.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Dari hasil analisis yang telah dilakukan mengenai Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengemambangkan SLB Negeri dan Swasta di Semarang dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yaitu merencanakan, melakukan pengkoordinasian, pembinaan sekaligus mengawasi dan mengupayakan pengelolaan manajemen layanan pendidikan agar lebih baik, maju dan berkembang. Selain itu juga, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus sangat berperan dalam fasilitasi

pengembangan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana, pengembangan kurikulum dan pembinaan kesiswaan Pendidikan Khusus.

- 2) Peran Dinas dalam pengembangan SLB yaitu melakukan perencanaan yaitu membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Melakukan Perencanaan penyusunan program pembelajaran berdasarkan kurikulum yang digunakan yaitu K-13.

Penetapan Kurikulum K-13 menyangkut standar isi, standar proses, penilaian dan pengelolaan. Baik SLB Negeri dan Swasta menggunakan kurikulum ini.

- 3) Tahap Pengkoordinasian yang dilakukan Dinas yaitu dengan membangun komunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan kepala sekolah negeri dan swasta yang dibawahinya. Selalu membangun komunikasi dengan kepala sekolah dan guru dengan membuat forum group diskusi secara tatap muka langsung atau melalui sosial media untuk membahas dan memberikan informasi tentang permasalahan, perkembangan dan solusinya untuk pengembangan SLB.

- 4) Sedangkan dalam Tahap Pembinaan yaitu Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah membuat forum organisasi kelompok kerja yaitu (Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), Forum

Kelompok Kerja Guru (FKKG), Forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah (FKKKS), Forum Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (FKKPS)). Kegiatan kerja kelompok dan forum berkontribusi dalam peningkatan kompetensi peserta kelompok kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Diharapkan dengan terstrukturanya kegiatan di kelompok kerja dan forum dapat meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan.

- 5) Untuk tahap pengawasan yaitu memantau dan melaporkan pembelajaran, kinerja kepala sekolah dan kinerja guru dalam mengelola pendidikan, menyusun agenda kepengawasan, menetapkan metode kerja dan menetapkan kinerja sekolah. Dinas juga memiliki TIM untuk mengawasi Kurikulum yang di jalankan, mengawasi kinerja dan kompetensi Kepala Sekolah dan Guru serta pelaporan hasil pengembangan Sekolah baik sarana dan prasarana, alat-alat penunjang kegiatan pendidikan dan ketrampilan.
- 6) Program yang disusun disesuaikan berdasarkan jenis ketunaan dan tingkat jenjang pendidikan, serta memberikan fasilitas sarana dan prasarana.
- 7) Program yang disusun berdasarkan tingkat kemampuan individu peserta didik karena kegiatan belajar mengajar menggunakan pengajar yang professional dalam bidangnya sesuai pendidikan Luar biasa.

- 8) Program pembelajaran yang disusun berdasarkan 5 aspek, yaitu 1) Permainan, 2) Aktivitas ritmik, 3) Aktivitas pengembangan uji diri keagamaan, 4) Aktivitas kebugaran jasmani, serta 5) kesehatan.

## **SARAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terdapat beberapa saran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah antara lain:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Badan Diklat SLB diharapkan untuk memberikan diklat, penataran, ataupun workshop yang lebih intensif kepada tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan Sekolah Luar Biasa dengan materi pembahasan tentang penyempurnaan kurikulum sekolah, Kebijakan Sekolah, Pembinaan menjadi tenaga yang profesional atau kompetensi yang harus dimiliki oleh personil sekolah, teknik dan prosedur penyediaan sarana prasarana, dan pemahaman tentang manajemen sekolah.
- 2) Untuk menjadikan SLB menjadi sekolah yang bermutu dapat menerapkan strategi yang efektif dengan mengoptimalkan unsur-unsurnya yang mencakup kurikulum, kebijakan sekolah, tenaga yang profesional, sarana dan prasarana, dan manajemen sekolah untuk mengembangkan SLB agar proses pembelajaran dan pendidikan di SLB berkembang sesuai dengan yang diharapkan.
- 3) Dalam pengembangan sekolah semestinya berkolaborasi dengan semua pihak, sehingga beban yang berat untuk memenuhi unsur-unsur strategi efektif yang diperlukan dalam mengembangkan sekolah akan menjadi

ringan dan pada akhirnya harapan untuk menciptakan sekolah yang bermutu akan tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Fattah, Nanang. 2013. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Garnida Dadang. 2009. *Sistem Dukungan (Supporting System) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, P4TK TK Dan PLB 2009*
- Harold Laswell, Abraham. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Homes. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo
- Jazuli Juwaini, Haji. 2007. *Otonomi Sepenuh Hati : pokok – pokok pikiran untuk perbaikan implementasi otonomi daerah*. Jakarta : Al-I'tishom.
- Lani Florian dkk, 2014. *The Sage Handbook of Special Education Second Edition*
- Mardiasmo. 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers edisi baru
- Solahudin Kusumanegara. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media
- Solichin Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Suparlan. 2011. *Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajaran, (Curriculum and Learning Manterial Development)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Supriadi, Dedi. 2003. *Guru di Indonesia*. Jakarta: Geranusa Jaya.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Penjabaran  
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa  
Tengah

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Teori\\_peran](http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran). Diakses pada tanggal 1 juli pukul  
14.00WIB

<http://semarangkota.go.id/> Diunduh pada tanggal 20 Januari 2017 Pukul  
12.00WIB